



Gerakan KUDU Sekolah

Tata Kelola dalam Penanganan ATS di Kabupaten Pekalongan

ATS di Kabupaten Pekalongan

Tercatat, jumlah anak tidak sekolah (ATS) cukup tinggi di Kab. Pekalongan, yaitu sebesar 4.346. Dari hasil verwal juga ditemukan beberapa penyebab ATS:

1. berasal dari keluarga berekonomi lemah;
2. mengalami pernikahan dini;
3. termasuk anak berkebutuhan khusus;
4. masih beranggapan pendidikan tidak penting.

Kabupaten Pekalongan, didampingi KOMPAK, mengusahakan penanganan ATS dengan Gerakan **KUDU Sekolah** yang menggunakan Kolaborasi Pentahelix, instrumen yang lengkap dalam aplikasi digital, pendampingan tuntas, serta akses pendanaan lintas sektor.



Gerakan Kembali Upayakan Dukungan Untuk (**KUDU**) Sekolah adalah gerakan sinergi berbasis teknologi digital yang mendata, mengonfirmasi, mendampingi dan memonitor anak tidak sekolah, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), agar kembali bersekolah.

Dampak Nyata Gerakan KUDU Sekolah

Tahun	2019	2020	2021	hingga Februari 2021	TOTAL
Jumlah ATS yang berhasil dikembalikan ke sekolah	389	340	668	359	1.756

SEBELUM INTERVENSI (2018)

- Rekam jejak data ATS manual:**
 - Data ATS berasal dari beberapa sumber data dengan versi masing-masing dan terpisah
 - Data ATS mudah rusak dan hilang karena menggunakan kertas
- Anggaran **Rp 184.100.000** hanya berasal dari APBD Kabupaten
- Belum tersedia regulasi** tentang ATS dan ABK
- Belum ada kelembagaan** yang terstruktur untuk penanganan ATS
- Ketersediaan satuan pendidikan:
 - Jumlah sekolah inklusi terbatas, hanya **7 SD dan 3 SMP**
 - Tidak ada bantuan secara personal untuk ABK
 - Banyak **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** ditutup karena kurangnya minat

SESUDAH INTERVENSI (2019-2021)

- Data ATS menjadi lebih akurat dan terintegrasi:
 - Pendataan ATS secara **online (real-time)** dengan teknologi berbasis **web** dan sistem **Android** (Aplikasi KUDU Sekolah)
 - Tahun 2020 total jumlah ATS menjadi 4.346 didapat melalui pemanfaatan aplikasi, sesuai hasil verwal desa dan rill di lapangan
- Sumber daya lebih variatif berasal dari:
 - Rp 1.091.748.600** dari APBD 2021 - Pendataan, Operasional ATS & Inklusi
 - Rp 357.700.000** dari APBD 2021 - Operasional kesetaraan
 - Rp 84.160.250** dari Dana Desa 2020 - Beasiswa siswa miskin
- Perbup No. 48 Tahun 2019 - Wajib Belajar 12 Tahun
- Perbup No. 420/255 Tahun 2020 - Penunjukan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi
- Perbup No. 49 Tahun 2020 - Kajian Satu Data
- Terbentuk tim **KUDU Sekolah** kabupaten dengan 19 lembaga tingkat kecamatan, dan 285 lembaga tingkat desa/kelurahan
- Ketersediaan satuan pendidikan:
 - Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebanyak **22 SD dan 20 SMP** mendukung ABK bersekolah dengan guru pendamping khusus
 - Bantuan personal kepada siswa berstatus ABK di sekolah inklusi berupa perlengkapan sekolah
 - PKBM-PKBM** hidup kembali hingga meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto di sektor jasa pendidikan

Replikasi Gerakan KUDU Sekolah

Gerakan KUDU Sekolah telah direplikasi ke seluruh desa (272 desa, 13 kelurahan) di Kabupaten Pekalongan.

Sosialisasi dan edukasi telah dilaksanakan di 10 kabupaten lain yang tertarik untuk menerapkan Gerakan KUDU Sekolah:

1. Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kabupaten Luwu Utara - Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kabupaten Maros - Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kabupaten Pangkajene Kepulauan - Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kabupaten Magetan - Provinsi Jawa Timur
6. Kabupaten Lombok Utara - Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Kabupaten Indra Giri Hulu - Provinsi Riau
8. Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
9. Kabupaten Pemalang - Provinsi Jawa Tengah
10. Kota Pekalongan - Provinsi Jawa Tengah

Kolaborasi Pentahelix menjadi Kunci Keberlanjutan

Kunci keberlanjutan gerakan **KUDU Sekolah** adalah kolaborasi berbagai pihak, untuk memastikan dukungan regulasi, anggaran, pendataan, dan pendampingan.

Pemerintah Daerah

Melibatkan Bappeda Litbang, Dindikbud, Dinas PMD P3A PPKB, Dinsos, Dindikcapil, Dinas PM PTSP dan Naker, Diskominfo, BPS, Kemenag, dan Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Desa

Mengalokasikan anggaran desa untuk penanganan ATS dan ikut serta melakukan verwal data, rekonfirmasi data, dan pendampingan kepada anak dan orangtua ATS

Dunia Usaha

Melibatkan dunia usaha dukungan sumber daya lewat CSR dari BUMD, Perbankan, dan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pekalongan

Perguruan Tinggi

Mengusung program penanganan ATS dalam KKN Tematik dan Penelitian

Masyarakat Peduli

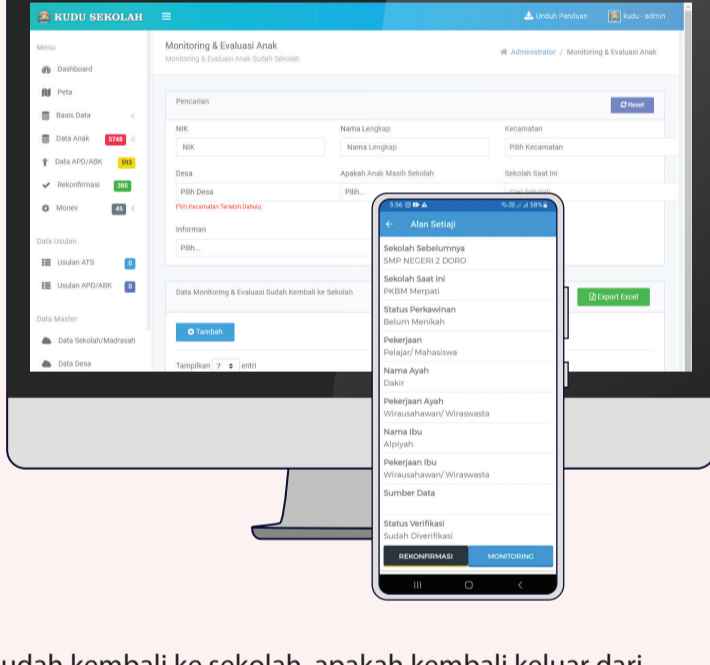
Mengajak berbagai organisasi masyarakat/lembaga untuk ikut berpartisipasi: TP PKK, NU, Muhammadiyah, Rifa'iyah, Paguyuban Kepala Desa, Muhammadiyah, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia Kab. Pekalongan, Forum Komunikasi PKBM, Karang Taruna, dan BAZNAS

Instrumen yang Lengkap di Aplikasi KUDU Sekolah

Dengan aplikasi KUDU Sekolah tim **KUDU Sekolah** memiliki instrumen **pendataan** awal ATS, **rekonfirmasi** ATS yang ingin kembali per tahun, **movev** ATS yang sudah kembali ke sekolah, dan **pelaporan**.

Rekonfirmasi yang dilakukan tiap tahun oleh tim **KUDU Sekolah** tingkat desa memampukan tim kecamatan dan kabupaten mengakses data yang akurat dan **real-time** terkait jumlah ATS yang bersedia kembali ke sekolah pada tahun ajaran sekolah berjalan di aplikasi **Android (KUDU Sekolah)** dan **website (www.kudusekolah.pekalongankab.go.id)**.

Movev dilakukan untuk mengawasi kehadiran ATS yang sudah kembali ke sekolah, apakah kembali keluar dari sekolah atau tetap di sekolah sampai menyelesaikan pendidikannya.



Pendampingan yang Tuntas

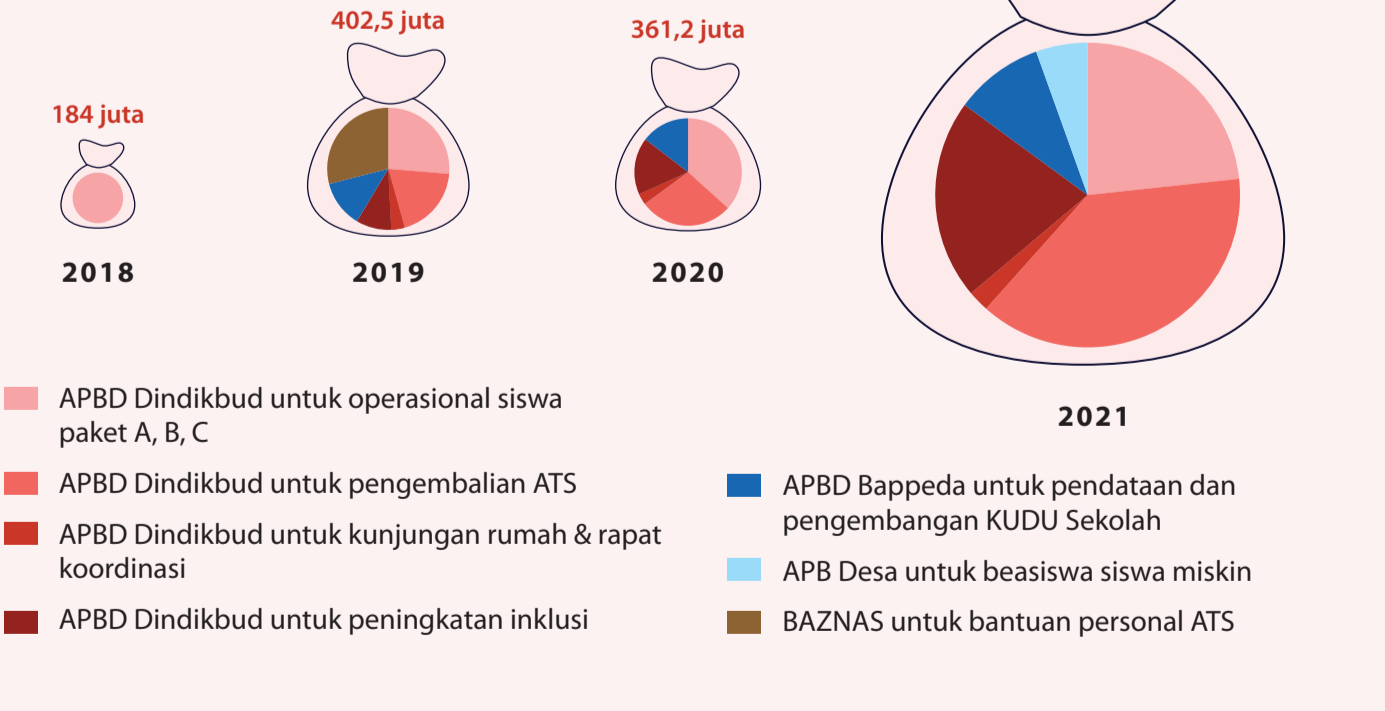
Pendampingan anak dan keluarga ATS di wilayah desa melibatkan pemerintah desa, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat, hingga paguyuban penyandang disabilitas.

Sosialisasi, edukasi, mediasi, dan pemberian motivasi yang dilakukan di tingkat desa menjadi ujung tombak yang akan mengembalikan ATS ke sekolah, terutama anak berkebutuhan khusus (ABK).

Dukungan kecamatan dalam pemantauan dan evaluasi pengembalian ATS termasuk ATS yang sudah dan masih disekolah, serta mereka yang kembali putus sekolah. Dukungan ini melibatkan pengawas/penilik sekolah dan pihak sekolah melalui rapat koordinasi kecamatan tematik.

Akses Pendanaan Lintas Sektor

Dengan data yang akurat dan terintegrasi dari aplikasi **KUDU Sekolah**, tim **KUDU Sekolah** dapat menyusun anggaran dengan tepat, baik dari segi jumlah, maupun potensi sumber pendanaannya. Dengan kolaborasi lintas sektor Gerakan **KUDU Sekolah**, Penanganan ATS yang sebelumnya hanya menggunakan APBD Operasional Siswa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini dapat mengakses berbagai sumber dana dari berbagai pihak.



Kembalikan Anak ke Sekolah, Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Anda!

Gerakan KUDU Sekolah memiliki posisi strategis dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Gerakan KUDU Sekolah melakukan pendataan dan pengembangan anak tidak sekolah ke sekolah formal maupun non formal, serta menyisir dewasa tidak sekolah untuk didorong kembali bersekolah melalui pendidikan non formal/kesetaraan. Hal ini memengaruhi **Indeks Pembangunan Manusia** Kabupaten Pekalongan sehingga **mengalami peningkatan menjadi 70,11 pada tahun 2021, dari sebelumnya 68,97 di tahun 2018** (berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah).

Silakan unduh dokumen terkait Gerakan **KUDU Sekolah** di tautan di bawah ini atau dengan memindai **QR code** di samping. bit.ly/replikasi-KUDU-Sekolah



Untuk menekan jumlah anak tidak sekolah di kabupaten Anda, silakan mereplikasi Gerakan **KUDU Sekolah** dengan menghubungi:

Didin Nasrudin, S.H., M.Si.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah
Telp: 0858-7620-4989

Anas Munawaroh, S.T., M.Si.
Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah
Telp: 0896-6642-4955

Nufiyanti, S.S.
Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah
Telp: 0856-4052-4955